

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Narkotika merupakan zat ataupun obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman maupun sintetis maupun non-sintetis. Narkotika memiliki efek langsung bagi penggunaannya diantaranya mempengaruhi perubahan kesadaran, menyebabkan mati rasa di sekujur tubuh, mengurangi rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan yang sangat berat. Penyebab ketergantungan ini dikarenakan narkotika memiliki daya toleran atau penyesuaian terhadap tubuh yang baik, juga daya habitual atau daya kebiasaan yang tinggi.<sup>1</sup>

Jika melihat penjelasan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika digolongkan ke dalam 3 (tiga) bagian berbeda, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Narkotika golongan I, adalah jenis narkotika dengan risiko tinggi menyebabkan ketergantungan sehingga tidak digunakan dalam terapi, dan hanya dapat digunakan dengan tujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan
- b. Narkotika golongan II, adalah narkotika yang juga memiliki potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan kepada penggunaannya, tetapi narkotika jenis ini juga memiliki khasiat pengobatan dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir. Pun penggunaannya diperbolehkan pula dalam terapi, dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan.

---

<sup>1</sup> Dr Subagyo Partodiharjo. 2010. *Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya*. ed. Daniel P. Purba, S. Sos. Jakarta. Esensi Erlangga. Hlm. 11

- c. Narkotika golongan III, adalah jenis narkotika yang memiliki potensi ringan untuk menyebabkan ketergantungan dan digunakan dalam terpai pengobatan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan<sup>2</sup>

Jenis-jenis narkotika yang dapat dimasukkan ke dalam setiap golongan-golongan tersebut, antara lain sebagai berikut :

1. Golongan I : Jenis narkotika yang secara umum dikenal masyarakat antara lain Ganja, Sabu-sabu, Kokain, Opium, Heroin, dll;
2. Golongan II : Jenis narkotika yang secara umum dikenal masyarakat antara lian Morfin, Pertidin, dll;
3. Golongan III : Jenis narkotika yang secara umum dikenal masyarakat antara lain Kodein, dll;<sup>3</sup>

Di dalam dasar pertimbangan pembuatan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika merupakan obat atau zat yang memiliki manfaat tersendiri di bidang kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Di sisi lain, jika narkotika ini disalahgunakan maupun digunakan tanpa ijin dan pengawasan seksama maka efeknya akan sangat merugikan pengguna. Salah satu efek yang paling dikenal adalah penimbulkan ketergantungan yang susah untuk disembuhkan. Bahwa mengimpor narkotika tanpa ijin, tanpa pengawasan, dan tanpa pengendalian dari pihak berwenang maka bisa dikategorikan sebagai tindak pidana narkotika.

Penyalahgunaan penggunaan narkotika ini, terutama penyaluran atau pengedarannya, rentan terjadi di lokasi yang padat penduduk serta dilengkapi

---

<sup>2</sup> Abi Jam'an Kurnia. *Ini Aturan tentang Penggolongan Narkotika di Indonesia*. Dalam <http://hukumonline.com>, diakses 29 November 2018.

<sup>3</sup> Eric Manurung, *Jenis Golongan dan Penerapan Pasal yang Dikenakan pada UU Narkotika*, dalam [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses 15 November 2018

dengan sarana prasarana yang mumpuni. Salah satu lokasi dengan kasus narkoba yang cukup banyak ialah Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo yang dikenal dengan sebutan Dataran Delta memiliki jumlah penduduk mencapai 2.226.424 dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki 1.122.597 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 1.103.827 jiwa terhitung sampai tanggal 31 Agustus 2018 yang lalu. Kepadatan penduduk di wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah 2.750/km<sup>2</sup>.<sup>4</sup> Kepadatan penduduk ini tidak disebabkan oleh angka kelahiran yang tinggi, melainkan akibat dari arus urbanisasi yang meningkat seiring dengan pertumbuhan industri dan perumahan di Kabupaten Sidoarjo.<sup>5</sup>

Akibat dari arus urbanisasi itulah banyak perpindahan dan pergerakan manusia keluar maupun masuk wilayah Kabupaten Sidoarjo setiap harinya. Pergerakan dan perpindahan manusia ini akan meningkatkan risiko peredaran gelap narkoba karena dengan banyaknya orang yang berpindah dari maupun menuju ke Kabupaten Sidoarjo, proses pendeteksian terhadap penyebaran narkoba dan pelakunya akan menjadi sulit. Ditambah dengan fakta bahwa lokasi Kabupaten Sidoarjo ini cukup strategis untuk penyaluran narkoba secara ilegal karena terdapat sarana prasarana berupa Terminal Bungurasih dan Bandara Juanda yang akan memudahkan para pelaku untuk mengirim atau memindahkan Narkoba keluar masuk wilayah Sidoarjo.

Padahal dalam Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, disebutkan bahwa :

---

<sup>4</sup> Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sidoarjo. *Profil Masyarakat*. <http://portal.sidoarjo.kab.go.id>. Diakses 8 November 2018

<sup>5</sup> *Ibid.*

*“(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba golongan I, maka akan mendapatkan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah)”*

Namun demikian, menurut Kapolresta Sidoarjo pada tahun 2017 yakni Kombespol Himawan Bayu Aji pada saat pelaksanaan Press Release Polresta Sidoarjo menyatakan bahwa ada peningkatan dalam kasus narkoba dari tahun 2016 ke tahun 2017. Di tahun 2016 terdapat 738 kasus dengan 843 tersangka. Sedangkan di tahun 2017, terdapat perubahan menjadi 603 kasus disertai penangkapan 686 tersangka.<sup>6</sup>

Melihat bahwa peredaran narkoba di Kabupaten Sidoarjo termasuk dalam kategori mengkhawatirkan dikarenakan kasus peredaran yang terjadi dari waktu ke waktu dan turut mempengaruhi banyak warga, maka permasalahan ini penting untuk dikaji guna mengetahui bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap kasus peredaran narkoba, serta upaya apa saja yang telah dan akan dimaksimalkan untuk dilakukan dalam menegakkan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di Kabupaten Sidoarjo serta kendala-kendala apa yang dialami selama proses penegakan hukum tersebut.

---

<sup>6</sup> Irwan Syairwan. *Kasus Narkoba Terbanyak Sepanjang 2017, Polresta Sidoarjo Cegah Lewat Kurikulum di Sekolah*. Dalam <https://surabaya.tribunnew.com>. Diakses 10 Desember 2017

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti ingin menyusun karya ilmiah ini dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN NARKOTIKA (Studi Kasus di Kabupaten Sidoarjo)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti, antara lain :

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap peredaran narkotika di Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap peredaran narkotika di Kabupaten Sidoarjo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan di atas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap peredaran narkotika di Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap peredaran narkotika di Kabupaten Sidoarjo.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dengan tercapainya Tujuan Penelitian sebagaimana tersebut diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat ganda, baik manfaat praktis maupun manfaat teoritis sebagai berikut :

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi bertambahnya pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap kasus peredaran narkoba yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mendukung proses penegakan hukum terhadap para pelaku pengedar narkoba maupun penggunaannya sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan kondisi masyarakat Indonesia khususnya wilayah hukum Kabupaten Sidoarjo.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Diharapkan dengan lahirnya tulisan ini dapat menambah Ilmu Pengetahuan di bidang hukum pidana khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap kasus peredaran narkoba, sehingga bisa menjadi sumber informasi terkini bagi penegak hukum agar memudahkan dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Serta menambah pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai upaya-upaya apa saja yang telah dan akan dimaksimalkan untuk dilakukan aparat penegak hukum untuk menanggulangi peredaran narkoba di Kabupaten

Sidoarjo, sehingga nantinya masyarakat dapat berpartisipasi untuk bahu membahu meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku peredaran narkoba.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk memecahkan permasalahan pada topik yang akan diteliti, peneliti telah memilih Lokasi Penelitian, Metode Pendekatan, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data yang sudah didapat, antara lain :

### **F.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi yang dipilih oleh peneliti untuk melakukan penelitian adalah di Polresta Kabupaten Sidoarjo yang beralamat di Jalan R.A. Kartini No. 87-A, Sidoarjo, Jawa Timur, dengan alasan Polresta Sidoarjo adalah salah satu dari penegak hukum yang memiliki kapasitas untuk menangkap pelaku, melakukan pemeriksaan, menyidik, dan menyelidiki kasus narkoba yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Dengan demikian, maka peneliti akan mendapatkan data-data pula mengenai bagaimana penanganan serta kendala yang dialami dalam proses penegakan hukum narkoba. Ditambah lagi, Polresta Sidoarjo turut memiliki peranan yang sangat besar terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap kasus peredaran narkoba.

Lokasi kedua yang dipilih oleh peneliti ialah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo yang beralamat di Perumahan Taman Pinang, Blok AA8, Nomor 1A, Lemahputro, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Alasan mengapa peneliti memilih Badan

Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo dikarenakan di sana terdapat data-data yang mendukung terkait dengan topik penelitian yaitu data mengenai perkembangan peredaran serta penggunaan narkotika dari tahun ke tahun.

## **F.2 Metode Pendekatan**

Untuk memecahkan permasalahan yang akan diteliti, peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pengertian dari pendekatan yuridis empiris antara lain peneliti menganalisis bagaimana *Das Sollen* dan *Das Sein* yang ada. Dengan kata lain pendekatan yuridis empiris ini adalah penelitian lapangan, untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan bagaimana kenyataan suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Peneliti akan membaca serta menelaah maksud dari Pasal 113 ayat (1) yang berisi tentang larangan bagi setiap orang untuk memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I secara melawan hukum. Dasar hukum tersebut selanjutnya akan dibandingkan dengan kenyataan yang ada bahwa tingkat peredaran atau penyaluran narkotika di wilayah Kabupaten Sidoarjo ternyata masih cukup tinggi.

Dalam mengurai permasalahan yang diteliti ini, peneliti juga menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder), serta dalam menganalisis permasalahan



dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Bahan-bahan hukum yang digunakan oleh peneliti ialah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan buku-buku yang berkaitan dengan penegakan hukum dalam hukum pidana, buku tentang narkotika dan jenis-jenisnya, dan buku tentang penegakan hukum tindak pidana narkotika.

### **F.3 Jenis dan Sumber Data**

Data yang hendak didapatkan untuk menopang hasil penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Namun penelitian ini lebih menitikberatkan pada data primer yaitu data yang didapat langsung dari lokasi penelitian, sedangkan data sekunder lebih bersifat penunjang.

Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber primer dan sekunder yaitu :

#### **a) Data Primer**

Data primer ini didapat langsung dari lokasi penelitian, yaitu dengan cara observasi lapang dengan menggunakan metode wawancara yang akan ditujukan pada pihak-pihak/narasumber yang sekiranya mempunyai informasi mengenai fokus pembahasan yang akan diteliti oleh peneliti, yaitu tentang perkembangan kasus peredaran narkotika serta bagaimana upaya penanganannya.

Wawancara akan dilakukan dengan :

1. Bapak Hermansyah selaku staf Divisi Rehabilitasi dan Ibu Widiati selaku Kasi Pencegahan dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo
2. Bapak Sugeng Purwanto S.H., M.H., selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Sidoarjo

Wawancara yang akan dilaksanakan oleh peneliti adalah bentuk wawancara yang terstruktur. Maksudnya ialah substansi dari wawancara ini sudah disiapkan terlebih dahulu oleh peneliti secara rinci untuk menghindari pembicaraan yang terlalu meluas dan diluar topik.

#### **b) Data Sekunder**

Data sekunder ini adalah penunjang untuk menganalisis data primer yang sudah peneliti dapat dari observasi antara lain yaitu berupa bahan hukum yang bersumber dari buku-buku literatur maupun dasar-dasar peraturan yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan fokus pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap peredaran narkoba.

Bahan hukum ini didapatkan melalui studi kepustakaan, dokumen, risalah perundang-undangan yang tersimpan dalam bagian dokumentasi. Perundang-undangan yang dipakai oleh peneliti untuk menganalisis data antara lain yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### F.4 Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang sesuai dan yang mencakup permasalahan yang diteliti, maka dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa *interview*/wawancara dan studi kepustakaan.

- a. Metode pengumpulan data melalui *interview*/wawancara ini dilakukan dengan prosedur cara tanya jawab yang dilakukan bersama narasumber yang ahli dalam penanganan tindak pidana dan ahli dalam bidang narkoba, yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap peredaran narkoba dan upaya yang telah dilaksanakan dalam proses penegakan hukum tersebut.

Wawancara ini dilakukan terhadap narasumber yang berhubungan langsung dengan objek penelitian, yakni :

1. Staf Divisi Rehabilitasi dan Kasi Pencegahan dari Badan Narkoba Nasional Kabupaten Sidoarjo yang beralamat di Perumahan Taman Pinang, Blok AA8, Nomor 1A, Lemahputro, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo
2. Kepala Satuan Reserse Narkoba (Setresnarkoba) Polresta Sidoarjo, yang beralamat di Jalan R. A. Kartini 87 A, Sidoarjo, 61218

- b. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelusuri bahan bacaan baik berupa jurnal, buku, peraturan perundang-undangan terkait dengan narkoba, dan bahan bacaan lain yang dapat memberikan dukungan teori terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba.

#### **F.5 Teknik Analisis Data**

Untuk memecahkan permasalahan pada topik yang dibahas, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis . Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

Analisis data kualitatif sebagai cara penjabaran data berdasarkan hasil temuan di lapangan dan studi kepustakaan, kemudian disusun dan dilakukan reduksi dan pengolahan data sehingga menghasilkan suatu sajian data yang kemudian dari data tersebut ditarik suatu kesimpulan.

#### **G. Sistematika Penelitian**

Penelitian Tugas Akhir Penegakan Hukum terhadap Peredaran Narkoba (Studi Kasus di Kabupaten Sidoarjo) ini disusun dalam sistematika penelitian sebagai berikut :

## **Bab I : Pendahuluan**

Dalam bab ini menguraikan mengenai Latar Belakang, yakni memuat landasan yang bersifat ideal *das sollen* dan kenyataan *das sein* yang melatar belakangi suatu masalah yang hendak dikaji lebih dalam.

Selanjutnya terdapat Rumusan Masalah yang diturunkan dari latar belakang memuat suatu masalah yang akan dibahas dan diteliti. Adapun selanjutnya terdapat Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian untuk mempermudah penyusunan penelitian hukum ini.

## **Bab II : Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini berisi tentang konsep dan pemaparan kajian-kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, yang mana nanti akan dijadikan landasan analisis hukum penelitian di bab selanjutnya yakni bab III pembahasan, dalam hal ini peneliti memilih kerangka teori mengenai: 1) Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum; 2) Tinjauan Umum tentang Narkotika;

## **Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam Bab III ini akan memaparkan hasil-hasil penelitian, apa yang menjadi pokok pembahasan sebagai objek kajian dalam penelitian, fokus permasalahan yang dikaji dalam bab ini mengenai bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap kasus peredaran narkotika, apa saja faktor-faktor penghambat maupun pendukung dalam penanganan kasus narkotika dan apa saja upaya yang telah dilakukan oleh Polres Sidoarjo beserta Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo untuk

menanggulangi peredaran narkoba tersebut. Kemudian permasalahan tersebut akan diuraikan seluruhnya dengan sistematika penelitian serta penggunaan bahan hukum yang telah disebutkan diatas, sehingga dapat ditemukan jawaban dari permasalahan tersebut.

#### **Bab IV : Penutup**

Bab IV ini merupakan bab terakhir dalam penelitian hukum ini yang terdiri atas kesimpulan dari Bab III dan berisikan saran atau rekomendasi peneliti terhadap permasalahan yang diteliti.

